



UNITED NATIONS
INDONESIA



PROFIL

Presiden sesi ke-76
Majelis Umum PBB,
Abdulla Shahid

NEWSLETTER

2022 | EDISI 3

SDG of the Month

16 PERDAMAIAN,
KEADILAN DAN
KELEMBAGAAN
YANG TANGGUH



© UN in Indonesia/Andri Suryo

KISAH

**Laporan: Strategi Responsif Gender
untuk Memerangi Ekstremisme
Kekerasan di Asia Tenggara**

**Menjangkau Yang Paling Tertinggal
dalam Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Sintang**

**Kontribusi Guru di Balik
Keberhasilan Manajemen Kesehatan
dan Kebersihan Menstruasi**

KEGIATAN

**Kunjungan Wakil
Sekretaris-Jenderal PBB
ke Indonesia**

**Hari Internasional
Penjaga Perdamaian
PBB**

**Platform Global untuk
Pengurangan Risiko
Bencana 2022**

CATATAN DARI KEPALA PERWAKILAN PBB DI INDONESIA



Valerie Julliard
Kepala Perwakilan PBB
di Indonesia

Pembaca yang budiman,

Selamat datang di edisi buletin ketiga kami.

Saya menulis kepada Anda setelah bulan Mei yang sibuk, yang memuncak dalam kunjungan lapangan ke Aceh dan Platform Global Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) ketujuh di Bali pada tanggal 25 Mei. Acara penting ini mempertemukan Wakil Sekretaris-Jenderal PBB, Amina Mohammed, Presiden Majelis Umum PBB, Abdullah Shahid, dan Presiden Indonesia Joko Widodo.

Dengan sorotan di Indonesia, sekitar 6.000 orang mendaftar untuk GPDRR dan setidaknya 4.000 delegasi hadir secara langsung di bawah protokol keselamatan COVID-19 yang ketat. GPDRR mencatat implementasi Kerangka Sendai, berdasarkan pengalaman para praktisi dan pembuat kebijakan di tingkat lokal, nasional, dan regional. Ini adalah contoh kekuatan pertemuan PBB yang luar biasa, dan kemampuan kita untuk memusatkan perhatian

global pada beberapa masalah paling mendesak di zaman kita.

Bulan ini, tim editorial kami telah mengumpulkan liputan tentang kunjungan Wakil Sekjen PBB ke kantor kami di Jakarta dan kunjungannya ke organisasi mitra PBB yang melakukan pekerjaan luar biasa dengan para penyintas kekerasan berbasis gender. Di bagian Profil edisi ini, tim kami duduk bersama Presiden Majelis Umum PBB, Abdulla Shahid untuk membahas "Presiden Harapan"-nya, dan isu-isu kritis seperti komitmen tidak berpartisipasi di panel laki-laki (*no manel*) dan pemulihan yang lebih baik dari pandemi.

Selain itu, kami memiliki beberapa cerita hebat dari badan-badan PBB di Indonesia, berbagi pekerjaan luar biasa mereka dalam membawa PBB lebih dekat kepada orang-orang yang dilayaninya tanpa meninggalkan siapa pun.

Saya harap Anda menikmati edisi terbaru ini.

Valerie

Kunjungan Wakil Sekretaris-Jenderal PBB ke Indonesia dan Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana



UN in Indonesia

Jadi ajari mereka yang datang di belakang Anda, ajari mereka yang di depan Anda, terutama para pemimpin yang belum cukup melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dengan lingkungan, sehingga mereka dapat memenuhi Perjanjian Paris dan sehingga mereka dapat memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.”

Pada tanggal 22 Mei, Wakil Sekretaris-Jenderal PBB (DSG) Amina Jane Mohammed mengunjungi ibu kota Indonesia, Jakarta, menjelang kehadirannya di Platform Global Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) ke-7 di Bali pada 25 Mei. Setelah pertemuan meja bundar dengan tim PBB di Indonesia, Ibu Amina bertemu dengan para pendiri dan penasihat di Yayasan Pulih, sebuah yayasan yang didukung UNFPA yang memberikan dukungan kesehatan mental dan psikososial kepada para korban kekerasan berbasis gender selama keadaan darurat. DSG juga terlibat dalam pertukaran dengan 15 pemimpin iklim muda dari seluruh Indonesia tentang bagaimana memperkuat suara pemuda tentang iklim di panggung dunia.

Setelah mendengarkan presentasi tentang proyek-proyek yang berkisar dari mendirikan bank pangan digital,

pertanian organik, hingga memetakan polusi udara, Wakil Sekretaris-Jenderal mengatakan dia ingin menyampaikan “energi, kemarahan, frustrasi, optimisme, dan harapan,” pemuda di Indonesia, dalam pertemuannya dengan para delegasi di Bali beberapa hari ke depan. Pada tanggal 23 Mei, DSG bertemu dengan mitra pembangunan internasional yang mendukung transisi Indonesia menuju energi rendah karbon, dan dengan Menteri Keuangan negara tersebut. Ia juga bergabung dengan para pemangku kepentingan di bidang pariwisata—termasuk Menteri Pariwisata Indonesia—untuk membahas cara menghidupkan kembali sektor yang dilanda COVID-19 secara berkelanjutan dan inklusif yang menjadi penopang ekonomi jutaan orang di negara ini.

Di Bali, Ibu Amina mengamati latihan gempa dan tsunami sekolah dasar, bagian dari program yang didukung UNDP untuk meningkatkan ketahanan di masyarakat yang sangat rentan terhadap bencana. Dia juga bergabung dengan

gerakan penanaman pohon bakau nasional yang dipimpin pemerintah—menunjukkan dukungan PBB untuk ekosistem yang rentan yang tidak hanya menyerap karbon dalam jumlah besar tetapi juga mengurangi dampak tsunami pada komunitas pesisir yang rentan.

“Kalian sudah menjadi pemimpin,” katanya kepada mahasiswa Indonesia yang memimpin inisiatif penanaman pohon lokal di dekat ibukota Bali, Denpasar.

Pada upacara pembukaan resmi GPDRR bersama Presiden Joko Widodo, DSG memuji upaya negara dalam pengurangan risiko bencana, “Indonesia adalah mitra penting yang memiliki banyak hal untuk diajarkan kepada dunia tentang pengurangan risiko bencana. Kesediaan Anda untuk menjadi tuan rumah pertemuan penting ini merupakan bukti peran utama yang Anda mainkan dalam pembangunan berkelanjutan dan Aksi Iklim.” Usai upacara pembukaan, DSG mengunjungi stan PBB di Indonesia sebagai bagian dari Platform Inovasi GPDRR dan berinteraksi dengan tim PBB di sana – termasuk menandatangani kanvas ‘tidak meninggalkan siapa pun’ - bersama dengan Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliard, Presiden Majelis Umum PBB, Abdullah Shahid, dan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal untuk Pengurangan Risiko Bencana, Mami Mizutori.

[Klik di sini](#) untuk liputan UN News tentang kegiatan DSG di Jakarta dan [di sini](#) untuk yang di Bali.



PROFIL

Mr. Abdulla Shahid,

Presiden Sidang ke-76 Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dalam kunjungannya ke Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) di Bali pada Mei 2022, kami berbicara dengan Presiden Sidang ke-76 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang berbagai isu: dari kekuatan harapan di tengah tantangan global, pesannya di GPDRR, pemuda dan kesetaraan gender, dan apa makna tidak meninggalkan siapa pun baginya.



© UN in Indonesia

Wawancara ini telah diedit untuk kejelasan.

PBB di Indonesia: Kampanye Anda untuk Presiden Majelis Umum disebut "Presidensi Harapan". Mengingat ketidaksetaraan yang semakin memburuk karena pandemi COVID-19, ancaman perubahan iklim dan ketahanan pangan yang membayangi, dan konflik di seluruh dunia, apa tujuan Anda dalam kepresidenan ini dan bagaimana Anda memicu harapan pada saat yang begitu penting?

Abdulla Shahid: Tujuannya adalah untuk menyampaikan sesuatu bagi manusia, planet, dan kemakmuran – bagaimana kita melakukannya? Dengan fokus dulu, yakni untuk pulih dari COVID-19. Ini berarti akses ke sumber daya medis, akses universal ke vaksin, karena tidak ada yang aman sampai semua orang aman. Ini juga berarti pulih dari keterpurukan ekonomi.

Prioritas kedua adalah membangun kembali secara berkelanjutan, karena kita tentu saja perlu membangun kembali ekonomi dan mata pencaharian kita, tetapi juga melakukannya dengan cara yang lebih berkelanjutan, yang lebih kuat, lebih hijau dan lebih biru. Dan ini semua melihat Agenda 2030 sebagai kerangka kerja.

Ketiga, kita perlu melihat lingkungan – krisis iklim, polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi laut dan laut kita.

Keempat, memastikan bahwa orang-orang menjadi pusat dari semua upaya kita, bahwa hak semua orang

dapat diwujudkan. Untuk melakukan semua ini, kita membutuhkan multilateralisme dan PBB sebagai jantungnya. PBB yang direformasi dan direvitalisasi, yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan planet ini, secara efektif dan efisien.

Bagaimana kita membangkitkan harapan? Dengan menunjukkan bahwa ada kemauan, bahwa ada jalan. Tujuan saya di setiap acara yang saya adakan adalah untuk menyoroti inisiatif dan kemitraan yang membuat perbedaan. Itu membuat perubahan menjadi mungkin. Tujuannya adalah untuk menyoroti bahwa ada sumber daya, teknologi, dan inovasi yang tersedia. Bahwa kita membutuhkan kemauan politik untuk mewujudkannya.

PBB di Indonesia: Sebagai seseorang dari Maladewa, Anda menyaksikan secara langsung bagaimana perubahan iklim menimbulkan risiko besar bagi masyarakat dan mata pencaharian lokal. Sekarang Anda berada di Indonesia, yang juga negara kepulauan dengan tantangan dan risikonya yang unik. Apa pesan Anda kepada para pemimpin dunia dan pakar yang hadir di GPDRR untuk mendukung komunitas rentan yang berisiko bencana?

Abdulla Shahid: Perubahan iklim bukanlah sesuatu yang jauh di masa depan. Hal ini terjadi sekarang. Dampaknya mulai terasa sekarang. Kehidupan dan mata pencaharian sedang terkena dampaknya sekarang. Cuaca semakin ekstrim, semakin tidak terduga. Kita harus segera mulai mempersiapkan diri.



Kita harus berbuat lebih banyak untuk memfasilitasi lebih banyak peluang. Terutama di tingkat pengambilan keputusan, di mana perspektif anak muda perlu didengar dan dihormati. Ini sangat dibutuhkan di tingkat nasional, dan lebih lagi di tingkat internasional juga.”

Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana, atau GPDRR, menyatukan Pemerintah, masyarakat, dan gagasan. Di sini, kita bisa melihat kemungkinan, berbagi ide dan tantangan serta praktik terbaik untuk mengatasinya. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk membangun kemitraan lintas negara dan di dalam negara.

PBB di Indonesia: Seperti kami di sini di PBB di Indonesia, Anda juga mendukung ikrar #NoManel, di mana Anda berkomitmen untuk tidak duduk di panel mana pun yang tidak seimbang gender. Apa inisiatif gender lain yang Anda miliki dalam kepresidenan Anda?

Abdulla Shahid: Kepresidenan saya didasarkan pada lima pilar atau prioritas. Setiap bidang prioritas saya, sinar Harapan saya, dapat dilihat melalui lensa gender. Baik itu memulihkan dan membangun kembali secara berkelanjutan dari pandemi, menanggapi planet ini, menghormati hak semua orang atau merevitalisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini adalah apa yang saya telah menginstruksikan tim saya untuk melakukan.

Selama tujuh bulan terakhir di kepresidenan saya, saya bangga dengan pekerjaan yang telah kami capai untuk memajukan kesetaraan gender. Saya telah berusaha untuk memastikan bahwa kantor saya seimbang gender. Sebaliknya, akan tepat untuk mengatakan bahwa saat ini kantor memiliki lebih banyak perempuan daripada pria. Saya juga menunjuk Penasihat Khusus untuk Kesetaraan Gender – Duta Besar Darja Bavdaz Kuret – untuk memastikan bahwa dimensi pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender diarusutamakan melalui Lima Sinar Harapan saya, acara dan inisiatif yang diamanatkan.

Dewan Penasehat Kesetaraan Gender telah ditingkatkan dan dibentuk kembali untuk memastikan sinergi antara Negara-negara Anggota, Sekretariat PBB, pilar hak asasi manusia dari Sistem PBB termasuk tentu saja UN-Women, masyarakat sipil dan sektor swasta. Dewan penasihat ini adalah dewan suara saya untuk ide-ide, dan saya dipandu oleh saran dan saran mereka.

Dari delapan *fellow* muda yang telah bergabung dengan Youth Fellowship Program saya, lima adalah diplomat perempuan.

Dan dengan bantuan Sekretariat PBB, kami memperluas dan meningkatkan ruang laktasi di Sekretariat PBB di New York. Sebuah ruangan baru yang terletak di belakang Aula Pertemuan Umum diresmikan minggu lalu untuk memastikan bahwa semua delegasi, termasuk mereka yang berkunjung selama minggu

tingkat tinggi, tidak perlu lagi meninggalkan tempat untuk memberi makan bayi mereka.

Selain itu, pada bulan Maret ini, saya mengadakan dialog informal dengan pakar perempuan di enam komite PBB tentang apa yang dapat dilakukan untuk memberdayakan perempuan dalam diplomasi. Untuk mencapai kesetaraan gender secara komprehensif, kita harus berbuat lebih banyak untuk menghilangkan hambatan, dan memberdayakan perempuan di semua bidang profesional, termasuk diplomasi. Penting juga untuk mengatasi dampak yang tidak proporsional dari COVID-19 pada perempuan dan anak perempuan di Asia Tenggara dan di seluruh dunia, seperti tingkat kekerasan berbasis gender yang lebih tinggi, tingkat pengangguran yang lebih tinggi di antara perempuan dan pemuda, gangguan sekolah yang menyebabkan putus sekolah, dan remaja. kehamilan dan pernikahan dini.



Di luar diplomasi, perwakilan politik adalah bidang lain di mana kita membutuhkan lebih banyak perempuan. Pada bulan Maret tahun ini, saya mengadakan Acara Khusus Pengakhiran Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Politik. Para menteri dan anggota parlemen yang hadir mengakui bahwa kekerasan adalah isu yang paling determinan bagi kesetaraan partisipasi perempuan dalam politik dan pemberantasan sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan memiliki ruang yang sama dan aman untuk berpartisipasi secara bermakna dalam politik.

Apa yang saya pelajari melalui diskusi saya dengan para pemimpin perempuan, diplomat, ilmuwan, dan masyarakat sipil di negara-negara yang saya

kunjungi, adalah bahwa tantangan, terlepas dari negara atau bidangnya, adalah sama. Apa yang juga saya pelajari adalah pentingnya mendengarkan wanita, dan meminta Anda, para wanita memandu diskusi tentang bagaimana kita dapat meningkatkan lingkungan kerja kita, dan masyarakat kita untuk menjadikannya lebih inklusif.

PBB di Indonesia: Salah satu program dalam kepresidenan Anda adalah *President of the General Assembly Youth Fellowship Programme*, di mana Anda menawarkan diplomat muda dari negara-negara yang kurang terwakili kesempatan untuk bekerja di kantor Anda. Sebagai seorang diplomat dengan karir yang cemerlang, apakah Anda melihat lebih banyak anak muda berpartisipasi dalam pengambilan keputusan? Bagaimana Anda ingin membawa lebih banyak orang muda ke forum kritis seperti Majelis Umum PBB?

Abdulla Shahid: Sepanjang karir saya, saya telah melihat berulang kali, orang-orang muda yang cerdas yang bersemangat, didorong, dan berkomitmen. Peran kaum muda tentu meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, di negara saya Maladewa, semakin banyak anak muda yang aktif dalam politik. Di Kementerian saya saat saya menjabat menjadi Menteri Luar Negeri, saya melihat orang-orang muda naik ke puncak pemerintahan.

Tapi kita harus berbuat lebih banyak untuk memfasilitasi lebih banyak peluang. Terutama di tingkat pengambilan keputusan, di mana perspektif anak muda perlu didengar dan dihormati. Ini sangat dibutuhkan di tingkat nasional, dan lebih lagi di tingkat internasional juga.

Salah satu hal yang telah saya lakukan adalah apa yang baru saja Anda sebutkan: *Fellowship*. Semakin banyak orang muda menjadi semakin kecewa. Dan bagaimana tidak? Dunia adalah tempat yang suram dan kita menghadapi banyak tantangan. Tapi kita harus membangun kembali kepercayaan pada multilateralisme. Dan *HOPE Fellowship* dibentuk untuk itu. Untuk membangun minat pada multilateralisme, menawarkan kesempatan bagi kaum muda dari negara-negara kurang terwakili yang biasanya tidak dapat datang, kesempatan untuk datang ke PBB, dan mengalami bagaimana segala sesuatunya dijalankan.

Selain itu, saya selalu berbicara dengan orang-orang muda ketika saya bepergian dan di New York – untuk mempelajari pandangan mereka, untuk mendengar keprihatinan mereka. Dan saya membawa mereka kembali ke PBB. Saya melakukan yang terbaik untuk menyertakan orang-orang muda dalam pertemuan yang saya adakan dan acara yang saya rencanakan.

PBB di Indonesia: Apa makna "tidak meninggalkan siapa pun" bagi Anda?

Abdulla Shahid: Ini adalah ungkapan yang sering digunakan sejak diadopsinya Agenda 2030. Bagi saya, itu berarti tidak ada seorang pun, di negara mana pun, tidak ada komunitas yang tertinggal dalam pencarian kita untuk pembangunan dan kemakmuran.

Bahwa setiap negara – kecil atau besar, maju atau terbelakang – didengar. Dan juga diikutsertakan. Inilah sebabnya mengapa saya menganjurkan intervensi yang ditargetkan untuk negara-negara kurang berkembang (LDC), negara-negara berkembang yang terkurung daratan (LLDCs), dan negara-negara berkembang pulau kecil (SIDS), karena kita tidak boleh meninggalkan mereka dalam upaya kita untuk maju.

Artinya, orang-orang yang sering terpinggirkan – perempuan, anak muda dan anak-anak, lansia – diikutsertakan. Inilah mengapa saya mengadvokasi kesetaraan gender, untuk kesempatan yang sama, agar suara kaum muda dimasukkan dalam pengambilan keputusan.

Tidak meninggalkan siapa pun bukan hanya kata-kata atau sesuatu yang baik untuk dikatakan. Kita harus mengadopsinya sebagai prinsip panduan kita.



Sustainable Development Goal of the Month



MEMPROMOSIKAN MASYARAKAT YANG DAMAI DAN INKLUSIF UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA DAN MEMBANGUN INSTITUSI YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN

SEBELUM COVID-19

— SETIAP HARI, —
100 WARGA SIPIL TEWAS
DALAM KONFLIK BERSENJATA



MESKIPUN ADA PERLINDUNGAN
DI BAWAH HUKUM INTERNASIONAL



TINGKAT PEMBUNYAN GLOBAL
TELAH MENURUN PERLAHAN

5.9
PER 100.000
PENDUDUK
(2015)

5.8
PER 100.000
PENDUDUK
(2018)

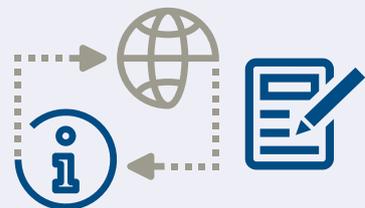
MENERJEMAHKAN KE
440.000 KORBAN PEMBUNYAN
DI SELURUH DUNIA

IMPLIKASI COVID-19

IMPLIKASI COVID-19 SEMAKIN MENGANCAM
PERDAMAIAN DAN KEAMANAN GLOBAL



SUDAH PADA TAHUN 2019, JUMLAH ORANG YANG
MELARIKAN DIRI DARI PENGANIAYAAN DAN KONFLIK
PERANG MELEBIHI 79,5 JUTA, TINGKAT TERTINGGI
YANG PERNAH TERCATAT



127 NEGARA
TELAH MENGADOPSI
UNDANG-UNDANG HAK ATAS
INFORMASI
— ATAU —
KEBEBASAN INFORMASI



60% NEGARA MEMILIKI PENJARA YANG PENUH SESAK
YANG BERISIKO PENYEBARAN COVID-19

Evakuasi Ternak Selamatkan Manusia dari Dampak Bencana Vulkanik



“FAO bekerja sama dengan BNPB dan Kementerian Pertanian untuk melindungi petani dari kerugian akibat bencana gunung berapi. Kami memberikan dukungan teknis yang diperlukan sesuai dengan Kerangka Sendai, kerangka kerja global untuk pengurangan risiko bencana, untuk melakukan studi dan mengembangkan pedoman penanganan ternak, termasuk evakuasi ternak, peningkatan kapasitas dan rencana respons yang mengarah pada latihan evakuasi hari ini.”

© FAO / Gayatri Kancana

Evakuasi manusia seringkali menjadi satu-satunya fokus upaya penanggulangan saat bencana terjadi. Namun, untuk pertama kalinya, pemerintah Indonesia mengintegrasikan evakuasi ternak sebagai elemen baru dan esensial dalam penanggulangan bencana. Ternak adalah aset mata pencaharian yang berharga, dan memiliki jalur evakuasi ternak dapat mengurangi korban manusia dan hewan serta kerugian ekonomi.



Diperingati setiap tanggal 26 April, Hari Siaga Bencana Nasional tahun ini meliputi latihan evakuasi ternak di Sleman, Yogyakarta.

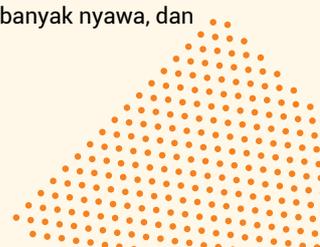
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.800 kematian sapi selama Erupsi Gunung Merapi 2010 dan diperkirakan 12,4% dari total kerugian ekonomi yang mempengaruhi pertanian dan usaha kecil dan menengah peternakan. Menurut Kepala BNPB, proses evakuasi manusia seringkali terhambat oleh petani yang enggan mengungsi jika harus meninggalkan ternaknya sebagai aset penghidupan yang berharga. Sementara itu, Indonesia memiliki risiko bencana gunung berapi yang tinggi dengan rata-rata 15 letusan per tahun dan dengan lebih dari 1,2 juta penduduk Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan gunung berapi dan bekerja sebagai keluarga petani.

Kepala Perwakilan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal, menambahkan pentingnya dukungan yang tepat dan kerjasama yang kuat untuk melindungi manusia dan hewan serta mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh bencana.

As the chair of the G20 and the host of the Global Platform for Disaster Risk Reduction this year, good disaster management efforts in Indonesia can offer good examples to the rest of the world. With a large population situated in the ring of fire, Indonesia's approach to integrating livestock in disaster mitigation efforts strengthens the country's preparedness, saves more lives, and reduces losses.

Sebagai ketua G20 dan tuan rumah Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana tahun ini, upaya penanggulangan bencana yang baik di Indonesia dapat menjadi contoh yang baik bagi dunia. Dengan populasi besar yang berada di wilayah cincin api (*ring of fire*), pendekatan Indonesia untuk mengintegrasikan peternakan dalam upaya mitigasi bencana memperkuat kesiapsiagaan negara, menyelamatkan lebih banyak nyawa, dan mengurangi kerugian.

[Baca lebih lanjut di sini.](#)



Laporan Baru: Seruan untuk Meningkatkan Upaya Implementasi Strategi Responsif Gender untuk Memerangi Ekstremisme Kekerasan di Asia Tenggara

Pada April 2022, UN Women dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia bersama-sama menerbitkan laporan setebal 58 halaman, [Gender Analysis on Violent Extremism and the Impact of COVID-19 on Peace and Security in ASEAN: Evidence-based Research for Policy](#). Laporan ini ditulis oleh Pusat Gender, Perdamaian dan Keamanan Monash di Universitas Monash di Melbourne, Australia.

Laporan tersebut berdasarkan survei para ahli dan wawancara yang dilakukan antara Juli dan November 2021, menemukan bahwa kelompok-kelompok ekstremis telah mengeksploitasi perintah tetap di rumah dari pandemi untuk membuat lebih

Laporan ini merekomendasikan agar kebijakan nasional untuk mencegah dan melawan ekstremisme kekerasan di kawasan Asia Tenggara:



Berdasarkan analisis gender tentang penyebab radikalisasi: apa yang mendorong laki-laki untuk bergabung dengan kelompok ekstremis mungkin tidak sama untuk perempuan.



Membedakan cara berbagai jenis kelompok ekstremis – etno-nasionalis, sayap kanan dan komunis – membangun norma gender yang memungkinkan atau membatasi partisipasi perempuan atau meningkatkan risiko kekerasan terhadap mereka.



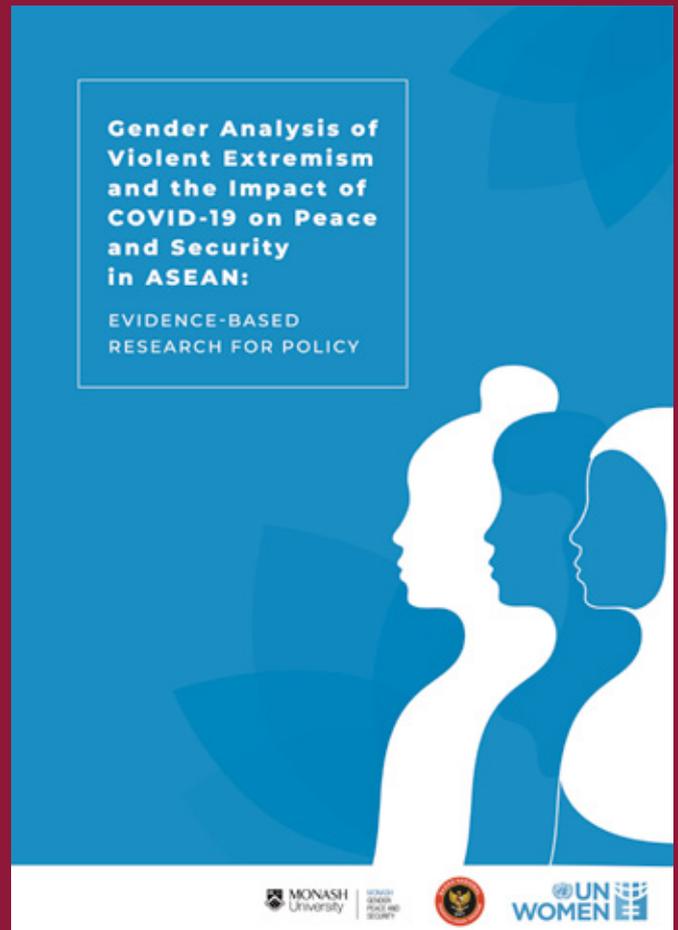
Mengakui bahwa perempuan tidak selalu menjadi (stereotipe) korban terorisme,, tetapi juga pelaku, pendukung, pemberi pengaruh, dan peserta aktif.



Melibatkan perempuan dan kelompok masyarakat sipil yang sudah menghadapi ekstremisme kekerasan di komunitas mereka.



Mengembangkan kontra-narasi yang mempromosikan kesetaraan gender, termasuk dengan menampilkan suara-suara perempuan yang sebelumnya terlibat dengan kelompok ekstremis.



banyak orang di wilayah tersebut terlibat dengan pesan mereka di media sosial dan platform online lainnya. Itu termasuk pandangan misoginis yang meningkatkan risiko perempuan menghadapi kekerasan seksual dan berbasis gender secara offline.

[Akses laporan lengkapnya di sini.](#)



Guru Menjadi Mentor Dibalik Keberhasilan Manajemen Kesehatan dan Kebersihan Menstruasi



© UNICEF/2021/WIlander

Ketika membahas masalah menstruasi, berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar remaja membicarakan perihal menstruasi dengan teman-teman sebayanya, dan hanya melibatkan orang dewasa seperti guru perempuan jika dirasa betul-betul dibutuhkan. Hal ini menunjukkan betapa menstruasi masih dianggap tabu dan bagaimana remaja perempuan masih merasa tidak nyaman dan malu dengan situasi tersebut.

Di SMPN 3 Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, guru pria bernama Agung Winanda merupakan salah satu orang dewasa yang ditujui ketika ingin membahas menstruasi. Agung sempat mengikuti pelatihan untuk guru tentang Manajemen Kesehatan dan Kebersihan Menstruasi (MKM) yang diselenggarakan di Kabupaten Tangerang oleh UNICEF, didukung oleh KAO Corporation melalui Komite Nasional Jepang untuk UNICEF.

Pelatihan MKM tersebut, kata Agung, memberinya wawasan dan pengetahuan yang memungkinkannya menjangkau siswa dan meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah tersebut. Ketika guru menerima pelatihan, mereka perlu menularkan pengetahuan kepada sesama guru dan kader kesehatan remaja. Salah satu intervensi yang menonjol dalam program MKM adalah buku komik yang asyik dibaca oleh siswa. Selain itu, kepala sekolah juga memainkan peran kunci dalam menciptakan kampanye yang sukses. Kepemimpinan mereka, mulai dari mengangkat guru yang ditunjuk hingga memastikan program berjalan lancar, telah membuka cakrawala baru tentang manajemen kesehatan menstruasi dan reproduksi bagi siswa dari semua jenis kelamin.

[Kenali lebih jauh tentang program MKM di sini.](#)

“

Di sekolah, murid perempuan kesulitan mengelola kesehatan dan kebersihan menstruasi karena kendala sarana dan prasarana. Apalagi, anak laki-laki sering meledek anak perempuan soal menstruasi.”



Menjangkau Yang Paling Tertinggal dalam Penanggulangan Bencana di Sintang, Indonesia

Musim hujan deras di penghujung tahun 2021 menyebabkan kota Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat mengalami banjir terparah dalam 58 tahun terakhir. Daerah itu sangat terendam dan lebih dari 112.000 orang mengungsi, dan di antara mereka adalah kelompok rentan seperti orang yang hidup dengan HIV (ODHA).

Begitu banjir semakin besar, para relawan segera memobilisasi diri. Ika Rizka, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat dari Ikatan Perempuan Positif/IPI (Ikatan Perempuan Positif), menerima bantuan untuk menyediakan makanan bagi para korban banjir dan mendirikan dapur umum sebagai titik pertemuan para aktivis di Kalimantan Barat. Menurut Ika, kesadaran relawan untuk tidak meninggalkan siapa pun sangat luar biasa. "Seorang relawan di dapur bertanya kepada saya apakah perlu bantuan khusus untuk ODHA," kenangnya.

Di bawah program Leaving No One Behind (LNOB) yang didukung oleh Pemerintah Jepang, Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) bekerja sama dengan JIP dalam merancang dan mendistribusikan perangkat bermartabat (*dignity kit*) pertama yang disesuaikan dengan kebutuhan ODHA selama keadaan darurat. Perangkat tersebut berisi perlengkapan mandi dasar dan kotak untuk menyimpan obat antiretroviral (ARV) dengan aman, karena penting bagi ODHA untuk mempertahankan pengobatan ARV mereka. Hingga 20 Maret 2022, paket harkat martabat telah dibagikan kepada ratusan ODHA yang terkena bencana seperti letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, dan gempa bumi di Pasaman dan Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Selama krisis kemanusiaan, ODHA lebih rentan karena tidak adanya layanan kesehatan dan ketidakstabilan sosial. Berkat relawan lokal seperti Ika, respon Sintang mampu mengurangi risiko, mengidentifikasi korban, dan menyalurkan bantuan dengan segera.

Untuk informasi lebih lanjut tentang respons di Sintang, klik di sini.



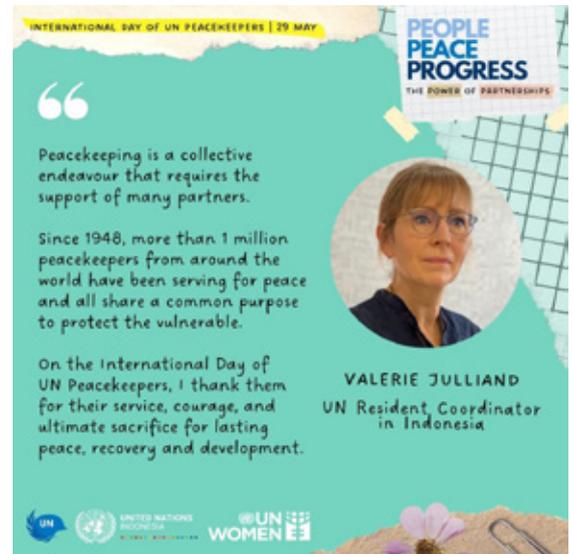
© JIP and Ikatan Perempuan Positif



Kampanye Hari Penjaga Perdamaian Memanfaatkan Kekuatan Manusia untuk Mengamankan Perdamaian, Kemajuan, dan Kemitraan

Selama lebih dari tujuh dekade, upaya penjaga perdamaian PBB telah menyelamatkan banyak nyawa dan mendukung perdamaian dan stabilitas di banyak negara. Hari Internasional Penjaga Perdamaian PBB diperingati setiap tanggal 29 Mei dan memberikan penghormatan atas pekerjaan tak ternilai dari penjaga perdamaian dan menghormati nyawa yang hilang karena mengabdikan diri di bawah bendera PBB.

Tema peringatan tahun ini adalah "Manusia. Perdamaian. Kemajuan. Kekuatan Kemitraan." Upaya dan misi penjaga perdamaian PBB untuk mengakhiri konflik dan mengamankan solusi politik yang langgeng tidak dapat sepenuhnya berhasil tanpa dukungan mitra. Baik dukungan dari Negara Anggota PBB, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, badan-badan PBB, atau pihak lain, kemitraan sangat penting untuk membawa



perbaikan nyata di bidang-bidang penting, seperti pembangunan ekonomi, supremasi hukum, hak-hak perempuan, hak asasi manusia, kesehatan dan pendidikan.

Sejak misi penjaga perdamaian pertama pada tahun 1948, lebih dari 1 juta perempuan dan laki-laki telah bertugas di [72 operasi penjaga perdamaian PBB](#), yang secara langsung berdampak pada kehidupan jutaan orang dan menyelamatkan banyak nyawa. Hari ini, Penjaga Perdamaian PBB mengerahkan lebih dari 87.000 personel militer, polisi, dan sipil dalam [12 operasi](#).

Untuk memperingati peristiwa penting ini, PBB di Indonesia dan UN Women menyelenggarakan kampanye media sosial yang menanyakan mitra kami tentang bagaimana kemitraan membantu mereka untuk memajukan perdamaian dan meningkatkan kehidupan di komunitas yang mereka layani.

Pada tanggal 29 Mei, kami menampilkan kartu kutipan dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, dan Perwakilan UN Women Indonesia tentang peran kemitraan dalam mewujudkan perdamaian berkelanjutan dan upaya kolektif di balik upaya pemeliharaan perdamaian.

Selain itu, delapan pasukan penjaga perdamaian Indonesia juga berbagi pengalaman mereka tentang misi dan bagaimana mitra berkontribusi dalam pekerjaan mereka dalam menjaga perdamaian, mencapai kesetaraan gender, dan meningkatkan komunitas lokal.

Kampanye satu hari ini menghasilkan lebih dari 18.000 tayangan di media sosial dan 1.000 keterlibatan (*engagement*). Keterlibatan media sosial yang terkenal termasuk akun resmi UN Peacekeeping, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Militer Indonesia (PMPP TNI), dan Duta Besar Indonesia untuk Swedia & Latvia.

[Baca tanggapan lainnya terhadap kampanye Hari Penjaga Perdamaian di linimasa Twitter @UNinIndonesia di sini.](#)



Menjadi salah satu dari ribuan

penjaga perdamaian yang melayani di seluruh dunia adalah kebanggaan yang tak ternilai untuk memperjuangkan hak hidup damai bagi setiap manusia di Bumi”

Ni Kadek Tia Cahaya Sari, seorang penjaga perdamaian yang saat ini menjalankan misi UNIFIL di Lebanon Selatan, dalam kartu kutipannya.



Calendar Highlights

Mei 2022

Mon Sen	Tue Sel	Wed Rab	Thu Kam	Fri Jum	Sat Sab	Sun Min
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

- 3 | Hari Kebebasan Pers Sedunia
- 8 | Hari Burung Migrasi Sedunia
- 9-13 | UN Forum tentang Hutan
- 9-21 | UNCCD COP15
- 20 | Hari Lebah Sedunia
- 22 | Hari Keanekaragaman Hayati Internasional
- 23-28 | Sesi Ketujuh Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana
- 29 | Hari Internasional Penjaga Perdamaian PBB
- 31 | Hari Tanpa Tembakau Sedunia

Juni 2022

Mon Sen	Tue Sel	Wed Rab	Thu Kam	Fri Jum	Sat Sab	Sun Min
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

- 2-3 | Stockholm+50
- 5 | Hari Lingkungan Hidup Sedunia
- 7 | Hari Keamanan Pangan Sedunia
- 8 | Hari Laut Sedunia
- 17 | Hari Sedunia untuk Memerangi Desertifikasi dan Kekeringan
- 18 | Hari Gastronomi Berkelanjutan
- 20 | Hari Pengungsi Sedunia
- 26-30 | Forum Perkotaan Dunia 11
- 27 June-1 July | Acara Tingkat Tinggi Konferensi Laut HL Event on Ocean Conference
- 30 June-1 July | Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Keselamatan Jalan Global



Tentang Persatuan Bangsa-Bangsa di Indonesia

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini, PBB terdiri dari 193 Negara Anggota. Misi dan pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB. Di Indonesia, PBB berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030. Tim Negara PBB dipimpin oleh Kepala Perwakilan PBB/UN Resident Coordinator (disingkat RC), perwakilan tertinggi dari sistem pembangunan PBB di tingkat negara. RC memimpin Tim Negara PBB dalam konsultasi dengan Pemerintah untuk menentukan dan menyepakati tanggapan strategis PBB terhadap prioritas pembangunan Pemerintah dalam mengimplementasikan Agenda 2030. Kepala Perwakilan PBB adalah perwakilan yang ditunjuk – dan melapor kepada – Sekretaris Jenderal PBB.

Kirimkan cerita Anda!

Kirim artikel, blog, atau foto-foto ke kami:
unic.jakarta@unic.org



**UNITED
NATIONS
INDONESIA**

 indonesia.un.org

 [UN in Indonesia](#)

 [UN in Indonesia](#)

 [United Nations in Indonesia](#)

